



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul  
Tanggal  
Surat Kabar  
Halaman

: Tantangan Perempuan Raih Kursi DPR  
: Minggu, 08 Mei 2022  
: Kompas  
: 2

## Tantangan Perempuan Raih Kursi DPR

Urutan atas di daftar caleg cukup menentukan keterpilihian. Untuk itu, dibutuhkan dukungan parpol agar caleg perempuan menempati urutan itu. Harapannya, 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen terpenuhi.

Ninuk Mardiana Pambudy

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April lalu juga meningkatkan kepercayaan diri bahwa kerja bersama bisa dilakukan dan memberi hasil.

Pertemuan Maju Perempuan Indonesia (MPI) di kediaman Wakil Presiden Dr. H. Edhy Nurdin dari Partai Gerindra, Kamis (28/4), juga membahas topik yang sama. Kelompok lintas partai, gerakan perempuan dan individu yang dilaksanakan Lembaga Maryana Mukti dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini membahas strategi meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga publik.

Pengesahan UU TPKS pada 12 April lalu juga meningkatkan kepercayaan diri bahwa kerja bersama bisa dilakukan dan memberi hasil.

Meresponsnya, beberapa hari yang lalu, anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bapemilu) Dian Fatma bahwasan perempuan satu perempuan saja di masing-masing lembaga tersebut bukan pekerjaan mudah.

Upaya untuk meraih kursi di DPR dalam berbagai posisi politik, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Setelah tahun 1999, keterlibatan organisasi masyarakat dalam mengawal perempuan yang memiliki kesadaran kesetaraan, menonjol dalam mendorong keterwakilan perempuan. Perjuangan terutama untuk adanya undakn khusus bagi perempuan (*positive action*) karena keterbatasan galan perempuan sifatnya sistem politik dan praktik politik tidak memberi kesempatan sebaliknya.

Tindakan khusus semacam ini berhasil meraihkan keterwakilan perempuan meski belum mencapai jumlah ideal 30 persen. Pemilu 2019 berhasil menempatkan 120 perempuan dari total 575 kursi DPR atau 20,8 persen. Ini adalah jumlah

tertinggi yang berhasil dicapai sejauh ini.

### Partai menentukan

Gerakan perempuan Indonesia pasca-Reformasi 1998 memang belum berhasil membuat masyarakat luas memperhatikan siapa dengan tidak berpartai politik dan golongan. Keterbelahan yang terjadi saat Pemilu 2019 berhasil cair dengan agenda bersama, yang meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan dan lembaga publik.

"Mengembangkan kepentingan perempuan memerlukan upaya yang berkelanjutan, memberi support pada pengembangan UU TPKS," ujar Hemas.

Hemas mengungkapkan, ingin lebih banyak lagi perempuan berkualitas berada di lembaga legislatif. "Kebutuhan politik membuat siapa pun dapat berpartai politik, yudikatif, dan legislatif."

Dalam praktikknya tidak mudah mendorong naiknya jumlah perempuan di parlemen.

Menurutnya, jumlah calon di parlemen juga tidak mudah bagi laki-laki, tetapi ada tantangan khas yang dihadapi perempuan. Kepala Badan Media Komisi Pemilihan Nasional (BPKN) Islamiyati Fatwa merasakan kesulitan untuk merempuan masuk ke parpol karena masih melahirkan politik sebagai dunia laki-laki.

Tantangan lain, peran perempuan di rumah dan di luar rumah. Sistem yang mendukung di dalam keluarga ini dalam keterlakuhan, di parpol, dan di masyarakat yang masih kuat dalam keterlakuhan perempuan di politik. "Perempuan di keluarga yang biasa terlibat dalam politik lebih tertarik terhadap kepolitan, keluarga lebih singkat," kata Dian.

Kendala talk show berada dalam biaya kampaiyan dan mengadakan diskusi di tempat pemungutan suara (TPS). Saat menyalon diri sebagai salah satu calon di PAN di Jakarta pada Pemilu 2019, Dian merasa sulitnya hilang dalam penghitungan di TPS akibat kekurangan saksi. Akhirnya, ia tak berhasil pada pemilu kali itu.

Menurutnya, kendala mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024

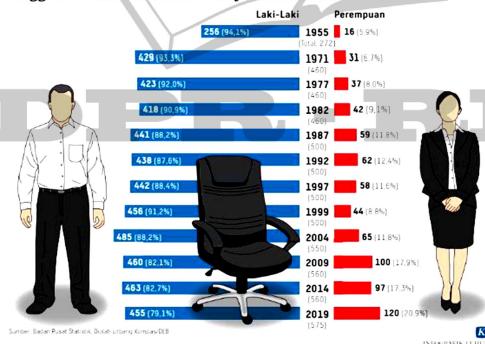
Saya Illyin dari PPP mencoba sejak Pemilu 2004 untuk dicalonkan sebagai calon independen. Pada Pemilu 2019 akhirnya menjadi caleg DPR untuk Derah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 7 yang meliputi Pacitan, Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek. Kondisi pertama adalah mobilisasi pertama diri karena masih begitu halus.

Menurut Illyin, saat bertemu calon pemilih, dia akan bertemu dengan mereka, selain seputar visi dan misi partai. Meskipun perempuan hanya menyebut, harus disiapkan dana Rp 2 miliar-Rp 3 miliar. Meskipun parpol membantu dana kampanye, jumlahnya terbatas. Itu pun biasanya saat



Anggota DPR periode 2019-2024, Jajaka Maharami, saat hadir dalam pelantikan anggota DPR-DPD dan MPR dalam sidang paripurna di Gedung Kuncikura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Hingga saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah.

### Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Badan Pusat Statistik, Gugus Litbang KPKR-KUB

campanage, praktikknya banyak caleg menyediakan lebar. "Pemilu itu semakin jelas, termasuk di dalamnya membutuhkan saat mendekati para pemilih (givaway), seolahnya harus datang tatap muka," tutur Illyin. Situasi ini berbeda dari strategi Dian Fatwa yang mengandalkan media sosial seperti Tik Tok untuk mengajak calon pemilih.

Untuk mendidik salski dan menemui calon pemilih, Illyin menyebut, harus disiapkan dana Rp 2 miliar-Rp 3 miliar.

Meskipun parpol membantu dana kampanye, jumlahnya terbatas. Itu pun biasanya saat

sesuatu yang konkret. "Pemilu itu semakin jelas, termasuk di dalamnya membutuhkan saat mendekati para pemilih (givaway), seolahnya harus datang tatap muka," tutur Illyin.

Situs ini berbeda dari strategi Dian Fatwa yang mengandalkan media sosial seperti Tik Tok untuk mengajak calon pemilih.

Menurut Illyin, saat bertemu calon pemilih, dia akan bertemu dengan mereka, selain seputar visi dan misi partai.

Apalagi, pemilih umumnya memilih caleg pada nomor urut 1 hingga paling jauh no-

lantuk cendera mata. Sebenarnya itu, calon pemilih menghindari lebar.

Eva Sandari, anggota DPR RI tahun 2004 hingga 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Direktur Sarinah Institute, berpendapat bahwa perempuan penting membantu meningkatkan jumlah perempuan di DPR. Pendapat serupa juga disampaikan Dian dan Illyin.

Apalagi, pemilih umumnya memilih caleg pada nomor urut 1 hingga paling jauh no-

tersebut.

Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menyebabkan rendahnya kebijakan dan peraturan yang memuat responsif gender dalam hal perwakilan berdasarkan nomor urut 1 sampai 3.

Pemantapan nomor urut caleg merupakan kewenangan parpol, karena itu peran parpol sangat besar. Nomor urut caleg pada parpol yang diambilkan bagus caleg yang menjadi pemimpin urusan partai. Karena itu, harus dibuktikan agar perempuan dapat diakui dalam kepengurusan partai. Perempuan mengandalkan posisi dalam struktural, kunciannya pada diskripsi partai, kunciannya pada kerugian bagi negara. Keteringgalan perempuan dalam pemantapan nomor urut caleg secara setara dan adil.

Perempuan sebagai separuh penduduk merupakan potensi dan daya tarik bagi bangsa yang memerlukan keterwakilan di seluruh strata negara. Keteringgalan perempuan dalam kerugian bagi negara.

Namun, jumlah saji tidak cukup. Sebagaimana diketahui, seorang wakil rakyat mendapat kursi, kursi diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak. "Bila tidak dibantu, pencapaian jumlah minimal 30 persen kursi di DPR tidak bisa dicapai," kata Eva.

**Mengapa 30 persen**

Pemilu 2024 akan beradu di 17 provinsi. Dalam setiap provinsi, ada portal mendapat kursi, kursi diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak. "Bila tidak dibantu, pencapaian jumlah minimal 30 persen kursi di DPR tidak bisa dicapai," kata Eva.

Menurutnya, tinggi posisi dalam sebuah lembaga di mana kebijakan penting diambil, semakin sedikit jumlah perempuan.

Karena itu, perempuan harus mendapat kursi di DPR. "Jika tidak mendapat kursi di DPR, maka tidak ada kelembagaan yang mewakili kepentingan perempuan," tambah Eva.

Tantangan perempuan pada Pemilu 2024 akan beradu di 17 provinsi. Dalam setiap provinsi, ada portal mendapat kursi, kursi diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak. "Bila tidak dibantu, pencapaian jumlah minimal 30 persen kursi di DPR tidak bisa dicapai," kata Eva.

Menurutnya, tinggi posisi dalam sebuah lembaga di mana kebijakan penting diambil, semakin sedikit jumlah perempuan.

Karena itu, perempuan harus mendapat kursi di DPR. "Jika tidak mendapat kursi di DPR, maka tidak ada kelembagaan yang mewakili kepentingan perempuan," tambah Eva.

Menurutnya, tinggi posisi dalam sebuah lembaga di mana kebijakan penting diambil, semakin sedikit jumlah perempuan.

Karena itu, perempuan harus mendapat kursi di DPR. "Jika tidak mendapat kursi di DPR, maka tidak ada kelembagaan yang mewakili kepentingan perempuan," tambah Eva.

Menurutnya, tinggi posisi dalam sebuah lembaga di mana kebijakan penting diambil, semakin sedikit jumlah perempuan.

Karena itu, perempuan harus mendapat kursi di DPR. "Jika tidak mendapat kursi di DPR, maka tidak ada kelembagaan yang mewakili kepentingan perempuan," tambah Eva.